**PRIMANOMICS : Jurnal Ekonomi dan Bisnis** - Vol. 21. No. 3 (2023)
Versi Online Tersedia di : https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ds
| 1412-632X (Cetak) | 2614-6789 (Online) |

# Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kab/Kota di Provinsi Bali Pada Tahun 2015-2022

Agam Firdaus[1)]
B300190142@student.ums.ac.id

Maulidyah Indira Hasmarini[2)]
mmaulidyah@ums.ac.id

[1)2)] Universitas Muhammadiyah Surakarta

## Abstrak

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan di suatu daerah, salah satu contohnya adalah ketimpangan terjadi karena adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis arah dan besarnya pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan yaitu indeks pembangunan manusia, upah minimum kabupaten, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel periode 2015-2022 di Provinsi Bali. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan model ekonometrik (estimator). Model yang dipilih dalam penelitian ini adalah model REM (randon effect model). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Bali pada periode 2015-2022 dipengaruhi oleh variabel tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, upah minimum kabupaten, dan jumlah penduduk.

**Kata Kunci:** Indeks gini, Upah Minimum Kabupaten, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Jumlah penduduk.

## PENDAHULUAN

Pembangunan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan setiap daerah mendapatkan pembangunan yang merata. Pada kenyataannya sulit mengimplementasikan pembangunan yang merata pada setiap wilayah terutama negara berkembang. Pada negara berkembang terjadi ketimpangan pembangunan tiap wilayah yang dimiliki. Menurut Word Bank, dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya dinikmat sekitar 20% orang yang kaya (Bank, 2015). Berarti sisanya masyarakat Indonesia belum dapat menikmati dampak baik dari pertumbuhan ekonomi yang kuat. Kenyataan tersebut menandakan bahwa terjadi ketimpangan yang cukup serius di Indonesia. Walaupun pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indicator untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara, tetapi pertumbuhan ekonomi tidak konsisten menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Apabila pembangunan hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi maka yang terjadi ketimpangan dalam masyarakat (Sukwika, 2018).

Dalam melakukan pembangunan ekonomi terjadi ketimpangan yang besar antar wilayah maka akan memiliki efek negative terutama dari segi ekonomi kemudian social dan politik (Rambey, 2018). Ketimpangan salah satu masalah yang terus meningkat seiring dengan pembangunan yang terus dilakukan. Maka hal ini menjadi focus pemerintah untuk mencari cara menanggulanginya. Pada negara berkembang kemiskinan dan ketimpangan pendapatan adalah masalah-masalah sebagian besar yang di hadapi, padahal ketimpangan yang terjadi tidak hanya itu tetapi mulai dari ketimpangan kekuasaan, gender, kepuasan kerja dan lainnya (Todaro & Smith, 2011). Maka ketimpangan ekonomi tidak bisa lepas dari ketimpangan non ekonomi. Ketimpangan pendapatan adalah distribusi yang tidak proposional dari pendapatan nasional total diantara berbagai rumah tangga dalam negara (Todaro & Smith, 2011).

Salah satu ukuran tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia menggunakan gini ratio. Gini ratio merupakan ukuran ketimpangan pendapatan yang digunakan, apabila nilai dari gini ratio mencapai angka 1 menandakan bahwa ketimpangan di wilayah tersebut tinggi dan sebaliknya apabila suatu wilayah memiliki nilai gini ratio mendekati 0 maka ketimpangan tesebut kecil(Statistik, n.d.). Pada Negara Indonesia,yang bertugas menghitung ketimpangan pengeluaran yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).

Grafik 1. Gini Ratio pada Provinsi BALI Pada Tahun 2015-2022

Sumber:(BALI, 2023)

Menurut penjadabaran yang telah dijelaskan diatas memberikan ketertarikan penulis dalam membahas penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kab/Kota di Provinsi Bali Pada Tahun 2015-2022.

## Landasan Teori

Ketimpangan pendapatan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk mengatasi ketimpangan yang semakin meningkat di Indonesia, sumber ketimpangan pendapatan harus diketahui. Setelah sumber ketimpangan teridentifikasi, maka kebijakan terbaik dapat dirumuskan untuk menutup kesenjangan distribusi pendapatan. Wicaksono (2017), menunjukkan bahwa pendidikan, kekayaan, serta sektor pekerjaan merupakan kontributor yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian Rasyidi (2021), menemukan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sementara variabel indeks pembangunan manusia dan investasi berpengaruh positif.

Penelitian Hariani (2019), menemukan bahwa hanya ada satu variabel yang signifikan menyebabkan ketimpangan pendapatan yaitu variabel IPM. Hal ini berarti tinggi rendahnya IPM mempunyai pengaruh pada tinggi rendahnya ketimpangan pendapatan. Sementara itu, dua variabel lain yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan upah minimum kabupaten/ kota (UMK) tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sementara, penelitian Sholikah (2022), menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan karena adanya pola distribusi pendapatan yang semakin timpang. Pada variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan karena produktivitas tenaga kerja yang baik akan dapat menurunkan tingkat ketimpangan. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif serta signifikan dikarenakan masih belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja yang ada.

Salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan yaitu upah minimum. Kebijakan upah minimum dianggap dapat mengurangi ketimpangan pendapatan karena menghasil penyerapan tenaga kerja yang tinggi dengan kondisi pasar yang kompetitif (Hanum & Sarlia, 2019). Dalam menerapkan upah minimum harus dalam kehati-hatian, ketika ditetapkan terlalu rendah maka standar hidup layak tidak terpenuhi. Apabila sebaliknya maka diperkirakan terjadi trade off employment (Rohmah & Sastiono, 2021)

Jumlah penduduk yang tinggi di suatu daerah tidak akan menimbulkan masalah jika pro-duktivitas penduduknya juga tinggi sehingga tidak menyebabkan distribusi pendapatan timpang. Permasalahan akan muncul jika jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan pengangguran dan kemiskinan yang berakibat pada ketimpangan distribusi pendapatan.Menurut (Arsyad, 2010). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berbanding lurus dengan ketimpangan pendapatan. Apabila TPT meningkat maka akan berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat (Sholikah & Imaningsih, 2022). Sehingga ketika pengangguran menurun maka ketimpangan pendapatan juga akan menurun. Walaupun pada kenyataannya tingkat pengangguran masih belum terselesaikan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitan terdahulu adalah pada determinan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Wilayah penelitian ini adalah Kab/Kota di Provinsi Bali dengan menggunakan data Panel periode tahun 2015 hingga tahun 2022. Penelitian ini menguji pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan yaitu indeks pembangunan manusia, upah minimum kabupaten, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka pada tingkat kab/kota di Provinsi Bali. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan wilayah provinsi

untuk dapat menentukan kebijakan dalam mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan, dan menganalisis peran digital ekonomi pada era revolusi industri 5.0 dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan.

# METODOLOGI

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian analisis deskriptif kuantitatif dengan teknik regresi data panel untuk mengetahui hubungan antar variabel. Penelitian ini dilakukan di Provinsi BALI. Variabel yang digunakan didalam penelitian ini yaitu indeks gini, jumlah penduduk, upah minimum kabupaten, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, indeks gini sebagai variabel dependen. Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari badan Busat Statistik (BPS) wilayah Provinsi Bali pada tahun 2015-2022. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi dengan data panel dan persamaan sebagai berikut:

$$IG_t = \beta_0 + \beta_1 logPOP_{it} + \beta_2 logUMK_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \beta_4 logUNM_{it} + \varepsilon_t$$

di mana:

| | |
|---|---|
| IG | : Indeks Gini (Persen) |
| UMK | : Upah Minimum Kerja (Juta) |
| IPM | : Indeks Pembangunan Manusia (Persen) |
| UNM | : Tingkat Pengangguran (Ribuan) |
| POP | :Jumlah Penduduk (Juta) |
| $\beta_0$ | : Konstanta |
| $\beta_1\beta_2$ | : Koefiesien Regresi |
| Log | : Operasi Logaritma |
| μ | : Variabel Pengganggu (eror term) |
| i | : Observasi (kabupaten/kota) |
| t | : Banyaknya waktu |

Tahap estimasi analisis regresi data panel akan meliputi: estimasi parameter model ekonometrik dengan pendekatan *Pooled Least Square (PLS)/CEM, Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM);* pemilihan model terestimasi terbaik dengan uji Chow dan uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier jika diperlukan; uji kebaikan model pada model terestimasi terpilih; dan uji validitas pengaruh variabel independen pada model terestimasi terpilih. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data panel, yaitu kombinasi antara data *time series* dan data *cross section*.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi model ekonometrik di muka dengan pendekatan *PooledLeast Square* (*PLS*)/CEM, *Fixed Effect Model* (*FEM*) dan *Random Effect Model* (*REM*) beserta hasil uji pemilihan modelnya terangkum pada Tabel1.

**Tabel 1**
**Hasil Uji Pemilihan Model**

**A.** Chow
Cross- Section $F(8.58)= 4.530177$; Prob. $F(8.58) = 0.0003$

**B.** Hausman
Cross-Section random $\chi^2$ (4) = 7.539084; Prob. $\chi^2 = 0.1100$

**C.** Lagrange Multiplier

Cross-Section Breusch-Pagan = 14.39981 ; Prob. = 0.0001

Uji Chow memperlihatkan bahwa (*FEM*) terpilih sebagai model terestimasi terbaik, terlihat dari probabilitas atau signifikansi pada uji chow memiliki nilai prob sebesar 0.0003 < 0,05. Uji Hausman memperlihatkan (REM) terpilih sebagai model terbaik terlihat pada probalitas atau signifikansi sebesar 0.1100 > 0,05. Sedangkan Uji Lagrange Multiplier memperlihatkan bahwa (REM) terpilih menjadi model terbaik terlihat pada nilai Both Breusch-Pagan sebesar 0,0001 < 0,05. Sehingga Hasil estimasi lengkap dari model terestimasi yang terpilih adalah *REM*, terlihat pada Tabel 2.

**Tabel 2**
**Model Estimasi *Random Effect Model (REM)***

| |
|---|
| $IG_{it}$=1.549512 - 0.046643logPOP - 0.085393logUMK + 0.003251IPM + 0.007721logUNM |
| (0.0022)* (0.0003)* (0,0231)** (0.0718)*** |
| $R^2$ = 0.2208456; *DW* =0.181695; *F*. = 4.885680; Prob. *F* = 0.001635 |

**Sumber**: BPS, diolah. **Keterangan:***Signifikan pada α = 0,01; **Signifikan pada α = 0,05; ***Signifikan pada α = 0,10; Angka di dalam kurung adalah probabilitas nilai statistik t.

Dari Tabel 2 menunjukan bahwa model terestimasi *REM* eksis dengan probabilitas atau signifikansi empirik statistik *F* bernilai 0,0016 (< 0,01), dengan nilai koefisien determinasi ($R^2$) sebesar 0,22084; yang artinya 22,08% **Ketimpangan pendapatan** dapat dijelaskan oleh varibel dalam model sedangkan sisanya sebesar 77,92% dipegaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan kedalam model.

**Hasil Penelitian**

Hasil analisis menunjukkan UMK (Upah Minimum Kabupaten) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada tingkat □=10% nilai probabilitas t-statistik sebesar 0,0003 (<0,01),Variabel Upah Minimum Kerja memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.085393 dengan pola hubungan Linear-Logaritma. Artinya, apabila Upah Minimum Kerja mengalami kenaikan sebesar 1 Persen, maka Ketimpangan Pendapatan akan mengalami penurunan sebesar 0,85393 persen. Sebaiknya, apabila Upah Minimum Kerja mengalami penurunan sebesar 1 persen, maka Ketimpangan Pendapatan akan mengalami kenaikan sebesar 0,85393 persen.

Hasil analisis menunjukkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada tingkat □=10% nilai probabilitas t-statistik sebesar 0,0231 (<0,05),Variabel IPM memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.003251 dengan pola hubungan Linear-Logaritma. Artinya, apabila Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan sebesar 1 Persen, maka Ketimpangan Pendapatan juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,03251 Persen. Sebaiknya, apabila Indeks Pembangunan Manusia mengalami penurunan sebesar 1 persen, maka Ketimpangan Pendapatan Juga akan mengalami penurunan sebesar 0,03251 persen.

Hasil analisis yang berarti menunjukkan UNM (Tingkat Pengangguran) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada tingkat □=10% nilai probabilitas t-statistik sebesar 0,0718 (<0,1),Variabel Tingkat Penganggura memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada tingkat □=10% nilai koefisien regresi sebesar 0.007721 dengan pola hubungan Linear-Logaritma. artinya, apabila Tingkat Pengangguran mengalami kenaikan sebesar 1 Persen, maka Ketimpangan Pendapatan juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,07721 Persen. Sebaiknya, apabila Tingkat Pengangguran

mengalami penurunan sebesar 1 persen, maka Ketimpangan Pendapatan Juga akan mengalami penurunan sebesar 0,07721 persen.

Hasil analisis menunjukkan POP (Jumlah Penduduk) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada tingkat □=10% nilai probabilitas t-statistik sebesar 0,00222 (<0,01),Variabel Jumlah Penduduk memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.046643 dengan pola hubungan Linear-Logaritma. Artinya, apabila Juamlah Penduduk mengalami kenaikan sebesar 1 persen, maka Ketimpangan Pendapatan akan mengalami kenaikan sebesar 0,46643 persen. Sebaiknya, apabila Jumlah Penduduk mengalami penurunan sebesar 1 persen, maka Ketimpangan Pendapatan juga akan mengalami penurunan sebesar 0,46643 persen.

**Pembahasan Penelitian**

Variabel Upah Minimum kerja (UMK) memiliki pengaruh yang signifikan dengan nilai negatif artinya ketika UMK naik maka Ketimpangan Pendapatan akan mengalami penurunan hal ini terjadi karena upah minimum memang sudah menjadi salah satu alat untuk menekan tingkat ketimpangan pendapatan. Upah minimum tidak hanya berarti sebuah batas terendah dari upah secara umum tetapi juga dapat mempengaruhi kenaikan pendapatan serta memberikan dampak dalam pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, Nazamuddin dan Nasir (2015) pada penelitiannya mereka menjelaskan bahwa Upah Minimum Kerja memiliki hubungan yang positif terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Naik dan turunnya Upah Minimum Kerja diikuti oleh perubahan pada Rasio Gini yang menunjukan bahwa kondisi pendapatan Indonesia juga akan mengalami perubahan.

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh yang signifikan dengan nilai positif artinya ketika IPM naik maka Ketimpangan Pendapatan juga akan mengalami kenaikan. Hasil ini menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia yang menggambarkan kondisi tingkat kesehatan maupun pendidikan penduduk pada wilayah tersebut, disaat kondisi di wilayah tersebut mengalami kanaikan berarti masyarakat pada wilayah tersebut menunjukan hasil yang baik, hal ini akan memberikan tenaga kerja yang berkualitas sehingga akan berpengaruh pada upah yang diterima tenaga kerja tersebut sehingga perbedaan tingkat kualitas tenaga kerja akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Kurnianingsih (2021), variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan. Semakin tinggi IPM maka semakin tinggi produktivitas penduduk sehingga tingkat pendapatan akan semakin tinggi.

Variabel Angka Jumlah Penduduk (POP) menunjukan hasil yang signifikan terhadap variable ketimpangan pendapatan, angka jumlah penduduk di suatu wilayah cenderung menunjukan bahwa penduduk di wilayah tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan upah yang ia dapatkan, hal ini tentu saja menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut. Semakin banyak penduduk miskin maka akan menyebabkan semakin tingginya ketimpangan pendapatan yang terjadi di wilayah tersebut. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Atmojo (2017) penelitiannya menjelaskan bahwa angka ketimpangan pendapatan terjadi karena adanya kesenjangan dari ketidakmerataan pada suatu kelompok masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin.

Variabel Tingkat Pengangguran (UNM) memiliki pengaruh yang signifikan dengan nilai positif artinya ketika Tingkat Pengangguran naik maka Ketimpangan Pendapatan juga akan mengalami kenaikan. Hasil ini menjelaskan bahwa Tingkat Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi. Penelitian ini juga mendukung Khoirudin (2020), menunjukkan tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Fatika Yoertiara (2022), variabel Tingkat Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap

ketimpangan pendapatan. Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah yang terjadi di negara sedang berkembang. Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan seseorang tidak dapat menerima pendapatan atau upah sehingga terjadi pelebaran kesenjangan antara penduduk kaya dan penduduk miskin karena berkaitan dengan pemerataan pendapatan (Putra, 2018).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di kab/ kota di provinsi bali pada tahun 2015-2022 dipengaruhi oleh variabel tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, upah minimum kabupaten dan jumlah penduduk. Dengan hasil yang telah dilakukan maka pemerintah pada kab/kota di provinsi bali perlu melukan peningkatan berbagai aspek guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan menekan ketimpangan pendapatan. Perbaikan aspek tersebut dapat meliputi meningkatkan pendidikan, memantau sektor-sektor yang dirasa memerlukan tenaga kerja yang lebih agar jumlah pengangguran mengalami penurunan dan berimbas pada naiknya pertumbuhan ekonomi untuk menekan tingkat ketimpangan pendapatan di kab/kota provinsi bali.

**Referensi :**

Bank, W. (2015). *Meluasnya Ketimpangan di Indonesia*. https://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide

Hanum, N., & Sarlia, S. (2019). *Pendapatan Perkapita TerhadapKonsumsi Di Provinsi Aceh*. *3*(1), 65–73. https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jse.v3i1.1291

Hindun, H., Soejoto, A., & Hariyati, H. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, *8*(3), 250. https://doi.org/10.26418/jebik.v8i3.34721

Rambey, M. J. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, *4*(1), 32–36.

Rinusara, N. M. (2020). Analisis ketimpangan ekonomi wilayah antar kabupaten/kota di provinsi daerah istimewa yogyakarta. *Sustainability (Switzerland)*, *4*(1), 1–9. https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article

Rohmah, Z., & Sastiono, P. (2021). Pengaruh Kebijakan Peningkatan Upah Minimum terhadap Ketimpangan Upah (Studi Kasus Provinsi-Provinsi di Jawa) The Effect of the Minimum Wage Increase on Wage Inequality (Java Provinces Cases). *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, *21*(2), 235–256.

Sholikah, N. R., & Imaningsih, N. (2022). PERTUMBUHAN, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, *10*(3), 247–253.

Statistik, B. P. (n.d.). *Gini Ratio*. https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1

Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, *6*(2), 115. https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan EKonomi* (A. Maulana & N. I. Sallama

(eds.)). Pearson Education Limited.

Ratiarum Fatika Yoertiara. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di pulau Jawa. Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Volume 1 Issue 1, 2022: 92-100.

Rifki Khoirudin. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tirtayasa EKONOMIKA Vol. 15, No. 1, April 2020.